

**ANALISIS PROSES REKRUITMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS PADA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN)**

Oleh:

M Reza Atmaja Hadi

(14010110141044)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

In legislative election many political parties faces the some problem, the existence of female representation. The existence of 30% quota system and zipper system makes all political parties focusing on preparing their female representative even more.

In this research, the writer used qualitative method which focuse on recruitment of female representative in DPC PPP in Semarang. The result of shows that the recruitment by DPC PPP in Semarang resulting female representative who are not to join the election itself.

DPC PPP in Semarang is one of the representative of legislative election 2014 in Semarang City. To prepare its female legislative representative DPC PPP in Semarang has already held a recruitment which is followed by its female representatives. The result of the recruitment is DPC PPP in Semarang can fulfill both rules mentioned before in legislative election 2014.

Most of them join the elections because of the encouragement from political parties staffs. In this year election, DPC PPP in Semarang itself lacks of female representative. Therefore, political staffs encourages its female representative to join the legislative election 2014. The recruitment process for female representative done by DPC PPP in Semarang can make this parties succesfully join in election. But in fact, these female representatives are only used as shield by the parties to face both systems.

Key words : *Female Representative, 30% Quota System, Zyper System and Recruitment of Female Legislative Representative.*

A. PENDAHULUAN

Kampanye penambahan kuota terus dilakukan sebagai bentuk perjuangan politik tuntutan hak pilih bagi perempuan di abad 20 tercapai. Kampanye kuota ini bertujuan untuk melawan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriaki. Kampanye peningkatan kuota ini termasuk dalam salah satu upaya *affirmative action* (Kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama.). Adanya kampanye kuota ini, perempuan berkesempatan menduduki kursi di parlemen dengan kuota 30 % dari keseluruhan calon terpilih.

Untuk merealisasikan tuntutan ini pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif melalui partai politik yang ada. Undang-undang no. 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang No 8 tahun 2010 pada pasal 53 sampai 58 dimana menyangkut sistem kuota 30% bagi perempuan. Dan yang paling baru pada undang-undang 8 tahun 2012 pasal 55 berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Serta pasal 56 ayat 2 undang-undang 8 tahun 2012 juga menguatkan keberadaan perempuan pada perpolitikan berbunyi “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Partai politik salah satu faktor pendorong pertumbuhan jumlah perempuan di dunia politik. Namun kita ketahui saat ini partai politik malah menjadi faktor

penghambat bagi pertumbuhan jumlah perempuan pada perpolitikan di Indonesia. Banyak alasan yang dikemukakan oleh partai politik kepada publik untuk menutupi permasalahan gender pada perpolitikan sehingga dapat dijadikan alat pembenarannya. Salah satu alasan yang diutarakan oleh partai politiknya minimnya perempuan yang memiliki kredibilitas dan intelektual yang memadai. Padahal jika melihat di lapangan banyak perempuan yang mempunyai kredibilitas dan intelektual yang bagus bahkan melebihi kaum laki-laki. Fenomena ini terjadi dan dirasakan oleh kaum perempuan hampir diseluruh Indonesia. Mereka merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kaumnya. Dan hal ini dirasakan oleh para perempuan yang ada di Kota Semarang.

Kota Semarang dengan jumlah penduduk 1.739.919 terbagi laki-laki 888.619 dan perempuan 871.370 pada pemilu 2009 hanya 6 anggota perempuan saja.¹ Peristiwa ini tidak dapat terpisahkan dari konstruksi sosial yang berkembang didalam masyarakat kota Semarang. Pandangan masyarakat kota Semarang bahwa seorang perempuan tidak pantas untuk memimpin melihat perempuan lebih mengutamakan emosionalnya ketimbang rasional. Pandangan ini sangat terlihat pada pemilu tahun 2009 dimana hasil menunjukkan perempuan dalam terwakilkan pada parlemen tidak mampu meraih kuota 30% sebagaimana yang telah diundangkan pemerintah.

Partai Persatuan Pembangunan menjadi fokus penelitian bagi peneliti, hal ini dilatarbelakangi kegagalan partai dalam pemilu legislatif tahun 2009 yang saat itu partai yang berlambang Kabah ini tidak dapat mencalonkan caleg perempuannya 30% secara merata. Terlihat pada dapil V dan dapil VI caleg perempuan yang maju tidak mencapai 30% dari keseluruhan caleg PPP yang maju di dapil tersebut. Memang pada tahun 2009 peraturan tidak begitu ketat sehingga partai dapat “menyepelkan” peraturan yang mewajibkan tiap partai mencalonkan perempuan minimal 30% di tiap daerah pemilihan. Melihat banyak partai yang tidak memperhatikan peraturan ini KPU membuat peraturan yang berisi kewajiban bagi

¹ www.dprd-semarangkota.go.id/, 2013

tiap-tiap partai untuk mencalonkan perempuan sedikitnya 30% dan hukuman bagi yang melanggar akan dicoret dari keikutsertaan pemilu.

Melihat ini partai mulai lebih memperhatikan peraturan ini, hal tersebut dilakukan juga oleh PPP dimana untuk menghadapi pemilu legislatif 2014 partai memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tiap daerah pemilihan Kota Semarang. Memang menjadi lebih baik perilaku PPP dalam menaati peraturan namun timbul kekhawatiran selanjutnya caleg perempuan yang dicalonkan memiliki kredibilitas yang bagus atau tidak.

B. PEMBAHASAN

B.1 Rekam Jejak Keterwakilan Caleg Perempuan PPP Kota Semarang

Setiap kali diadakan pemilu legislatif PPP di Kota Semarang selalu ikut berpartisipasi dan mengirimkan caleg – calegnya untuk bersaing dengan caleg dari partai lain guna memperebutkan kursi DPRD Kota Semarang yang hanya tersedia 50 saja. Calon legislatif dari PPP sendiri berasal dari kader – kader yang loyal terhadap PPP dimana terdiri laki – laki dan perempuan. Dalam pemilu legislatif DPC PPP selaku dewan yang diberi mandat dari pusat sebagai perwakilan untuk mengurus perpolitikan PPP di Kota Semarang mengirimkan calegnya yang didominasi oleh caleg laki – laki. Tercatat pada pemilu legislatif 2009 DPC PPP Kota Semarang mengirimkan 14 caleg perempuan dari 43 peserta caleg dari PPP. Sedangkan untuk pemilu legislatif yang jatuh pada tahun ini turun menjadi 13 caleg perempuan dari 35 peserta caleg PPP di Kota Semarang.

Jumlah peserta caleg PPP pada pemilu 2014 mengalami penurunan, hal ini juga terjadi pada caleg perempuan yang mengalami penurunan satu caleg perempuan. Disamping itu dominasi caleg laki – laki di lingkungan PPP sendiri masih kuat. Hingga pemilu terakhir kemarin jumlah caleg perempuan dari PPP belum mengalami penambahan sama sekali. Penurunan jumlah caleg perempuan yang terjadi di DPC PPP Kota Semarang sangat disayangkan mengingat jumlah perempuan di parlemen sendiri masih 7 perempuan saja. Dengan adanya penurunan jumlah seperti ini secara tidak langsung nantinya akan berimbas pada jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Semarang periode 2014 – 2019.

Pemilu legislatif 2014 PPP Kota Semarang tidak bertingkah laku sama seperti pada saat pemilu legislatif 2009. DPC PPP Kota Semarang berhasil memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada semua dapil yang ada di Kota Semarang. Sebuah kemajuan bagi kinerja DPC PPP Kota Semarang dapat menyediakan caleg – caleg perempuannya untuk bertempur dengan caleg perempuan dari partai lain. Sanksi dari KPU Kota Semarang pun tidak akan menimpa PPP sebab kali ini PPP dapat mematuhi dengan tertib dan tidak melanggar segala peraturan pemilu legislatif.

B.2 Proses Rekrutmen Caleg Perempuan DPC PPP Kota Semarang

Dengan adanya tindakan rekrutmen yang dilakukan partai politik diharapkan para caleg yang maju nanti sangat kredibilitas dan berpendidikan sehingga nantinya kelak caleg tersebut lolos menjadi wakil rakyat dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Nusantara. Rekrutmen yang dilakukan partai politik sendiri bisa berasal dari internal partai yang merupakan kader – kader partai dan juga bisa melakukan rekrutmen dari eksternal partai bagi orang yang lepas dari lingkungan partai. Partai politik akan melakukan rekrutmen sebaik dan seketat mungkin sehingga bakal caleg yang lolos benar – benar terbaik.

Sebagai salah satu peserta pemilu legislatif 2014 PPP di Kota Semarang melakukan rekrutmen caleg baik perempuan maupun caleg pria. Sebuah tanggung jawab dari DPC PPP Kota Semarang untuk melaksanakan rekrutmen bakal caleg yang berasal dari internal PPP. Kader – kader PPP baik pria maupun perempuan yang menonjol menjadi prioritas bagi pengurus harian dan LP2C (Lazna Pemenangan Pemilu Cabang) selaku panitia rekrutmen untuk mengusung para kader tersebut menjadi caleg. Tentu semua itu tergantung pada kadernya bersedia diusung atau tidak sehingga PPP sendiri tidak melanggar hak asasi dari kader tersebut.

Adanya rekrutmen caleg seperti ini bukanlah terjadi pada pemilu legislatif 2014 saja namun pada pemilu sebelumnya PPP di Kota Semarang juga melakukannya. Disamping mencari bibit unggul diantara kadernya, DPC PPP

Kota Semarang juga menginginkan dengan dilakukan rekrutmen ini para caleg yang dihasilkan dapat tampil dengan bagus dan mampu bersaing dengan caleg dari partai lain sehingga dapat menjaga nama baik PPP di Kota Semarang. Dapat diketahui PPP di Kota Semarang tidak populer hanya pada lokasi – lokasi tertentu PPP populer. Sangat perlu penampilan yang berbeda dari caleg – caleg PPP sehingga mampu menarik perhatian masyarakat Kota Semarang dan hasilnya mampu mendongkrak jumlah caleg PPP yang lolos di DPRD Kota Semarang.

B.2.1 Persyaratan Caleg Perempuan PPP Kota Semarang

Persyaratan untuk menjadi caleg PPP di seluruh Indonesia sama tidak ada perbedaan sehingga para bakal caleg akan memenuhi persyaratan yang sama. Persyaratan pertama yang ditetapkan dan diimplementasikan pada DPC PPP Kota Semarang ialah kewajiban bagi setiap bakal caleg yang mendaftar di PPP harus beragama Islam. Hal ini berlandaskan pada pasal 2 AD/ART PPP yang berbunyi “PPP berasaskan Islam”. Dengan berasaskan agama Islam PPP mewajibkan para bakal caleg harus beragama Islam. Tidak hanya pada bakal caleg saja namun seluruh pengurus dan kader – kader PPP merupakan umat Islam. Dari dulu hingga sekarang PPP tetap konsisten pada dasarnya yang berpegang teguh pada agama Islam. Sebagai partai pertama yang lahir dengan asas Islam PPP ingin menjaga kekonsistenan tersebut. Disamping itu di internal partai yang berlambang Kabah ini berisi ulama dan kyai yang terkenal sehingga Islam didalam PPP begitu kental dan sulit pudar.

Persyaratan kedua yang tidak kalah pentingnya ialah keharusan setiap caleg baik pria maupun perempuan untuk memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) partai. Dengan adanya kepemilikan KTA bagi bakal caleg perempuan maka dirinya sudah menjadi keluarga besar PPP. Sebab tidak mungkin orang nyaleg pada sebuah partai politik tanpa memiliki KTA partai secara tidak langsung orang tersebut tidak memiliki ikatan batin maupun fisik dengan partai tersebut. DPC PPP Kota Semarang mewajibkan bagi bakal calegnya untuk mengantongi KTA sebelum dirinya mendaftarkan diri nyaleg di PPP. Dengan KTA membuktikan diri

bahwa bakal caleg perempuan tersebut loyal terhadap partai dan terlibat menjadi kader PPP.

Dan terakhir persyaratan yang harus dipenuhi oleh para bakal caleg perempuan ialah sehat jasmani maupun rohani. Yang dimaksud sehat jasmani tentu sehat dari segi fisik para bakal caleg perempuan sebelum dirinya mendaftarkan dirinya. Tidak ada cacat permanen maupun penyakit parah yang diderita bakal caleg perempuan saat pendaftaran. Sehat rohani lebih terletak pada kesehatan psikologi dan kejiwaannya. Selama hidup bakal caleg perempuan diharapkan tidak pernah mengidap kelainan kejiwaan seperti sakit gila.

B.2.2 Penjaringan Calon Bakal Caleg Perempuan PPP Kota Semarang

Sebelum dilaksanakan rekrutmen caleg PPP baik perempuan maupun pria DPC PPP Kota Semarang mengadakan rapat tertutup dimana dihadiri oleh pengurus harian dan LP2C. Tujuan dari rapat tersebut untuk memantapkan segala persiapan yang berkaitan dengan rekrutmen caleg. Hasil rapat yang dilakukan di kantor DPC PPP Kota Semarang membuahkan keputusan dimana menginstruksikan seluruh organisasi sayap PPP di Kota Semarang untuk menginventaris nama – nama kader yang pantas dicalonkan pada pemilu legislatif 2014.

Dan meminta jajaran pengurus tingkat kecamatan atau yang disebut PAC untuk menginventaris nama – nama yang bakal diajukan menjadi bakal caleg. Setiap PAC yang ada di Kota Semarang diberikan kekuasaan untuk mengusulkan siapa saja kader yang layak dicalonkan dalam koridor tiap – tiap wilayah PAC. Disamping dua pihak tersebut pada level DPC PPP sendiri juga melakukan inventaris nama – nama kader dikalangan pengurus harian yang pantas untuk dimasukkan dalam daftar nama bakal caleg. Pemberian mandat kepada kedua pihak tersebut tertuang pada surat resmi partai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Diharapkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan nama – nama calon bakal caleg sudah masuk ke DPC PPP Kota Semarang.

Untuk rekrutmen bakal caleg perempuan hampir sama dengan rekrutmen bakal caleg pria yang membedakan hanya pada mandat yang diberikan kepada organisasi sayap PPP. Dalam rekrutmen bakal caleg perempuan mandat yang diberikan terfokus kepada organisasi sayap WPP (Wanita Persatuan Pembangunan) sebagai wadah berkumpulnya para kader perempuan PPP. WPP sendiri memang berfokus pada kader perempuan PPP dimana kegiatan organisasi tersebut untuk memberdayakan perempuan PPP. Sehingga sangat pas apabila mandat dari DPC PPP turun ke WPP Kota Semarang untuk mengusulkan kadernya bisa pengurus harian atau anggotanya untuk menjadi salah satu daftar calon bakal caleg perempuan. Diharapkan organisasi sayap WPP mampu mengirimkan banyak nama – nama calon bakal caleg perempuan sehingga pengurus harian DPC PPP dengan LP2C mampu memilih calon bakal caleg perempuan yang terbaik dan lolos menjadi bakal caleg perempuan PPP.

Dalam rekrutmen bakal caleg perempuan di tingkat PAC mekanismenya sama tidak ada perbedaan dengan rekrutmen bakal caleg pria. Setiap tingkat wilayah kecamatan, pengurus harian PAC mendata kader – kader perempuan yang menonjol untuk dimasukkan kedalam daftar calon bakal caleg perempuan yang nantinya dikirim ke DPC PPP Kota Semarang. Tidak hanya bagi kader perempuan yang menonjol saja yang bisa masuk kedalam daftar calon bakal caleg perempuan, pengurus harian PAC membuka kesempatan bagi kader perempuan yang lainnya untuk mencalonkan dirinya. Sama seperti organisasi sayap WPP dengan semakin banyak nama calon bakal caleg perempuan yang diusulkan oleh tiap – tiap PAC semakin bagus sebab kompetisi dalam seleksi bakal caleg perempuan di DPC PPP Kota Semarang berjalan kompetitif.

B.2.3 Seleksi Calon Bakal Caleg Perempuan DPC PPP Kota Semarang

Test seleksi yang pertama dilakukan oleh para calon bakal caleg perempuan merupakan test paling utama yakni test agama. Dimana tiap – tiap calon bakal caleg perempuan di test dalam bacaan Al Quran dan bacaan shalatnya yang diuji oleh orang – orang ahlinya sehingga penilaiannya begitu ketat. Lagi – lagi

kembali pada asas partai yang berpegang teguh pada agama Islam. Penerapannya pun hingga test seleksi dimana agama menjadi kunci bagi kelolosan bagi calon bakal caleg menjadi bakal caleg PPP. Disamping itu dengan diadakan test agama ini akan menyelamatkan nama baik PPP sendiri. Sangat memalukan apabila wakil rakyat dari PPP kelak tidak bisa membaca Al Quran dan tidak bisa salat padahal PPP sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Upaya antisipasi dini yang dilakukan oleh pihak partai untuk menjaring calon bakal caleg yang nantinya akan merusak nama partai. Semua ini terlepas dari urusan korupsi yang kelak menjerat wakil rakyatnya, DPC PPP Kota Semarang mengaku tidak dapat membendungnya sebab korupsi kembali pada tiap – tiap individu.

Test seleksi kedua merupakan test kesehatan dan test psikologi yang dilaksanakan di RSJ Kota Semarang. Semua calon bakal caleg baik perempuan maupun pria melaksanakan test seleksi ini. Pada test kesehatan hanya berputar dengan pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan kesehatan yang nampak tidak sampai tingkat pemeriksaan dalam. Untuk test psikologi DPC PPP Kota Semarang mempercayakan pada RSJ di Kota Semarang yang memang pihak yang berkompeten dibidangnya. Para calon bakal caleg diberi beberapa pertanyaan yang tujuannya untuk meneliti keadaan psikologi dari tiap calon bakal caleg. Semua hasil test kesehatan maupun test psikologi dikirim ke DPC PPP Kota Semarang.

Pada test seleksi selanjutnya para calon legislatif diminta untuk mengisi sebuah formulir yang nantinya akan menunjukkan pengalaman dari tiap – tiap calon bakal caleg yang berkompetisi di PPP Kota Semarang. Dari pihak pengurus harian DPC PPP Kota Semarang beserta LP2C akan mempelajari rekam jejak kehidupan dari para calon bakal caleg. Seperti pengalaman menduduki sebuah jabatan pada organisasi tertentu. Dengan memiliki pengalaman menduduki jabatan tersebut maka calon bakal caleg tersebut memiliki wawasan yang luas ditambah jaringan yang terbentuk di tengah masyarakat. Hal – hal seperti inilah yang dibutuhkan bagi calon bakal caleg sebelum dirinya terjun ketengah masyarakat guna menarik simpati.

Pada penilaian tingkat loyalitas dari tiap calon bakal caleg DPC PPP Kota Semarang melihat dari keikutsertaan dalam kegiatan partai. Keaktifan tiap calon bakal caleg seperti menjabat pada posisi struktur partai maupun organisasi sayap PPP. Semakin lama jabatan yang pernah dilaksanakan semakin baik penilaian yang didapat oleh calon bakal caleg. Dari lama jabatan tersebut dapat disimpulkan bahwa loyalitas terhadap PPP yang terbangun pasti tinggi. Keinginan untuk pindah partai atau keluar dari partai kemungkinan akan sedikit sebab hati dari calon bakal caleg tersebut telah istiqomah dengan PPP. Fenomena kutu loncat partai saat ini sering ditemui dengan iming – iming posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya seorang kader dengan mudah melepaskan seragam partainya. DPC PPP Kota Semarang tidak ingin melihat kadernya yang diusungnya kelak menjadi wakil rakyat berkhianat terhadap partai. Sebuah tamparan keras bilamana hal tersebut terjadi pada caleg PPP baik perempuan maupun pria.

Dan terakhir tahapan seleksi yang harus dilalui para calon bakal caleg tersebut ialah wawancara. Wawancara antara tiap – tiap calon bakal caleg baik perempuan maupun pria dengan pengurus harian DPC dengan LP2C. Di kantor DPC PPP Kota Semarang para calon bakal caleg dipanggil satu – satu ditanya terkait dengan kesiapan dan persiapan yang dilakukan oleh calon bakal caleg tersebut guna menghadapi pemilu legislatif 2014.

B.2.4 Penetapan Calon Bakal Caleg Perempuan Menjadi Bakal Caleg Perempuan

Setelah usai para calon bakal caleg melakukan semua tahapan seleksi baru kemudian tugas dari pengurus harian DPC beserta LP2C untuk menggodok seluruh hasil penilaian dari tahapan seleksi para calon bakal caleg. Seluruh penilaian dari calon bakal caleg baik perempuan maupun pria dirapatkan bersama – sama tanpa ada perbedaan yang dilakukan oleh panitia penetapan. Pengurus harian DPC beserta LP2C mulai menimbang dari hasil penilaian test seleksi baik test agama, test kesehatan, test psikologi dan data pengalaman hidup baik ditengah masyarakat maupun dalam kepartaian. Semuanya itu masuk penilaian untuk merumuskan siapa saja yang lolos. Disamping itu ditambah dari hasil

penilaian dari wawancara tatap muka dengan tiap calon bakal caleg juga masuk pada salah satu unsur penilaian.

Proses menimbang dari tiap – tiap calon bakal caleg ini memakan waktu yang lama sebab untuk menilai pantas atau tidak dari tiap calon tersebut menghabiskan 3 jam sendiri. Dengan ada 36 peserta calon yang mendaftar maka untuk merapatkan memerlukan waktu seminggu lebih guna menimbang dari seluruh calon bakal caleg. Waktu yang lama memang diperlukan oleh panitia penetapan dengan dalih tidak ingin gegabah untuk meloloskan calon bakal caleg sehingga nilai yang masuk dipelajari dengan baik.

Akhirnya dalam seminggu lebih guna mempelajari dari hasil seleksi yang masuk pengurus harian DPC beserta dengan LP2C dapat merumuskan siapa – siapa calon bakal caleg yang lolos menjadi bakal caleg PPP. Dari 36 peserta yang mendaftar dirumuskan dan diputuskan bahwa semua peserta calon bakal caleg lolos menjadi bakal caleg yang nantinya akan didaftarkan oleh DPC PPP di KPU Kota Semarang untuk menjadi caleg PPP yang maju pada pemilu legislatif 2014. Pelolosan untuk semua calon bakal caleg ini dirasa tepat oleh pengurus harian DPC dan LP2C sebab dari semua peserta telah memenuhi persyaratan dan standart yang ditetapkan DPC PPP Kota Semarang untuk menjadi bakal caleg.

Dan 13 calon bakal caleg perempuan pun semuanya lolos menjadi bakal caleg perempuan PPP. Dirasakan tidak mungkin dari pihak DPC PPP Kota Semarang jika ingin tidak meloloskan dari salah satu calon bakal caleg perempuan sebab DPC sendiri merasa kekurangan kader perempuan untuk dicalangkan. Dengan jumlah hanya 13 kader perempuannya yang mendaftar untuk memenuhi disetiap dapilnya sangat minim sekali untuk menutup kuota 30% dimana kader pria yang mendaftar dua kali lipat dari jumlah kader perempuan yang mendaftar.

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Dalam rekrutmen caleg perempuan yang dilakukan oleh DCP PPP Kota Semarang pada pemilu kali ini hanya menghasilkan caleg perempuan 13 orang saja. Dimana mekanisme rekrutmen caleg perempuan tersebut telah sesuai dengan peraturan pemilu berlaku dan AD/ART partai. Namun para caleg perempuan tersebut bukan berasal dari usulan PAC dan organisasi sayap WPP dimana kedua organisasi tersebut diberi mandat untuk merekrut dan mengusulkan calon bakal caleg perempuan. Pada saat itu tidak ada satupun kader perempuan yang mencalonkan dirinya. Sehingga pada tenggat waktu yang telah disepakati tidak ada nama kader perempuan yang masuk dari PAC maupun organisasi sayap.

Rendahnya jumlah caleg perempuan PPP di Kota Semarang dipengaruhi tingginya biaya kampanye yang nanti dikeluarkannya. Banyak kader perempuan yang menjadi orang kedua di lingkungan keluarga yang ekonominya pas - pasan. Oleh karena itu banyak kader yang tidak mau ikut nyaleg karena dana yang akan dikeluarkan begitu besar ditambah suami tidak memberikan persetujuan untuk terjun mencalonkan diri. Dalam pemilu sendiri dana yang dikeluarkan berasal dari alokasi dana tiap caleg perempuan dan dikelola sendiri. Pihak DPC PPP Kota Semarang sendiri tidak membantu dalam alokasi dana kampanye hanya cuman memberikan solusi bagi caleg perempuan yang kesusahan mencari pasangan kampanye. Itupun bantuan jatuh tidak menyeluruh bagi caleg perempuannya.

C.2 Saran

Bagi DPC PPP Kota Semarang harus melakukan suatu hal yang penting dalam rekrutmen caleg perempuan guna menghadapi pemilu legislatif 2019 sehingga dapat mendongkrak jumlah caleg perempuannya. Sebenarnya masih banyak kader perempuan PPP di Kota Semarang yang mau mencalonkan dirinya pada pemilu namun dengan keterbatasan dana yang dimiliki mengurungkan keinginan kader perempuan tersebut. Peran partai dalam persoalan ini

sangat penting yang diharapkan mampu membantu menyelesaikan permasalahan para kader perempuan.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut DPC PPP Kota Semarang dapat membantu dalam mengalokasikan dana kampanye bagi para caleg perempuan yang akan maju. DPC bisa menyisihkan dana dari sebagian pemasukan yang diperoleh PPP di Kota Semarang untuk nantinya diberikan kepada caleg perempuannya untuk kepentingan kampanye. Para caleg perempuan sangat membutuhkan bantuan tersebut karena akan meringankan dana yang dikeluarkan untuk berkampanye. Hal ini bisa menjadi motivasi bagi kader – kader perempuan lainnya sehingga tumbuh rasa keinginan mencalonkan diri yang berasal dari pribadinya. Disamping itu pihak DPC PPP Kota Semarang membuktikan diri bahwa pihaknya peduli terhadap nasib caleg perempuannya. Hingga saat ini belum ada caleg perempuan yang mencalonkan diri berasal pribadinya semuanya merupakan dari dorongan partai.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Firmansyah. 2008. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Fitriyah. 2012. *Teori dan Praktek Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pito, Toni Andrianus. Dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Syafiie, Inu Kencana & Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S.. 2003. *Kebijakan Pihak yang Membumi, pembaharuan administrasi publik Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Jurnal

- Ainur Rofieq (2011) “*Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2*, hal 65-79.
- Helmi Mahadi (2011) “*Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P pada Pilkada Kabupaten Sleman*”, *Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 2 No. 1*, hal 1-30.
- Mari Rosieana (2013). “*Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Malinau.*” *eJurnal Pemerintah Integratif Vol. 1 No. 1*, hal. 1-12.

Website

www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

www.dprd-semarangkota.go.id/

www.kpukotasemarang.info

www.wri.or.id